RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2020

RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugaspemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Baram.

Batam, Agustus 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong

Kota Batam

PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SALIM, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel.....iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2019 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Renstra..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam..... 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM 29

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 31

3.3 Program dan Kegiatan 32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM 37

BAB V PENUTUP 42

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019 8

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

Tabel 3 Pemetaan Permasalahan Umum untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 18

Tabel 4 Prioritas Pembangunan, Fokus, dan Program Ranwal RKPD Tahun 2021..... 21

Tabel 5 Prioritas Pembangunan, Fokus, dan Program Ranwal RKPD Tahun 2021..... 25

Tabel 6 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021..... 28

Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam..... 32

Tabel 8 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021dan Prakiraan Maju Tahun 2022 34

Tabel 9 Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2021 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan

Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

j. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42);

q. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

r. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;

s. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

t. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batan Nomor 108);

u. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 488);

v. Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 747).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dantujuandari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA BATAM TAHUN 2019

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, review terhadap Ranwal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

Memuat rincian program dan kegiatan dan pendanaan tahun 2021

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra

Pada Renja tahun 2019, Satuan Polisi PamongPraja Kota Batam merencanakan 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
   1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
   1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat:
   1) Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah;
   2) Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam;
   3) Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan;
   4) Pengamanan Obyek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam;
   5) Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas;
   6) Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden.

Seluruh Program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan pencapaian Renstra:

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01		Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
01		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	50 %	50

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	01	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	50%	50
02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**20%**	**20**
	01	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	20 %	20

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.01.05		**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
15		**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat**	**1. Jumlah aksi demo yang diamankan**	**50 kali**	**25 kali**	**25 kali**	**25 kali**	**100**	**25 kali**	**7 kali**	**14**
	01	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	Terlaksananya penertiban rumah liar dan kios liar/bangunan bermasalah di lahan milik Pemerintah	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100	8 kali	1 kali	8

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	02	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Terlaksananya operasi yustisi terhadap pelanggaran perda	12 kali	3 kali	12 kali	12 kali	100	9 kali	-	-
	03	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	Terkendalinya jam operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	100	15 hari	-	-
	04	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya pengamanan unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis	50 kali	25 kali	25 kali	25 kali	100	15 kali	7 kali	14

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	**344 orang**	**60 orang**	**80 orang**	**-**	**-**	**100 Orang**	**-**	-
	05	Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas	Terlaksananya pembinaan Linmas dan peringatan HUT Linmas tingkat Kota Batam	344 orang	60 orang	80 orang	-	-	100 orang	-	-
	06	Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden dan	Jumlah TPS yang diamankan	2923 TPS	-	2923 TPS	2923 TPS	100%	-	-	-

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2019, ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, memenuhi target kinerja dan melebihi target kinerja yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2019 dan Renstra dengan rincian sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Renja Tahun 2019:

   1) Kegiatan Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas, di mana pembinaan Satlinmas sebanyak 80 orang tidak terlaksana dikarenanya adanya rasionalisasi akibat defisit anggaran. Dengan demikian maka tingkat realisasi kegiatan tersebut 0%.

b. Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja Renja Tahun 2019:

   1) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

   2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

   3) Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Kota Batam, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

   4) Operasi Yustisi terhadap Peraturan Daerah Kota Batam, dengan realisasi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja Renja dan Renstra juga 100%;

   5) Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan, dengan realisasi pelaksanaan 100% yaitu selama 30 hari sesuai dengan Renja, sehingga tingkat capaian realisasinya juga 100%.

      Terpenuhinya target kegiatan tersebut karena komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menjaga kekhusukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa sehingga selama 30 hari dilakukan pengawasan terhadap jam operasional THM, dan pada kegiatan tersebut juga tidak dilakukan pemotongan anggaran.

c. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja Renja Tahun 2019

1) Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam, dengan realisasi pelaksanaan 120%, dimana realisasi pengamanan terhadap obyek vital selama tahun 2019 sebanyak 30 kali, sedangkan target Renja hanya 25 kali.

   Meskipun tingkat capaian realisasi sebesar 120% dari Renja Tahun 2019, namun capaian kinerja realisasi Tahun 2019 masih belum memenuhi capaian target kinerja Renstra, yaitu 50kali. Capaian kinerja tahun 2019 baru memenuhi 60% dari target Renstra.

   Hal ini terjadi karena sepanjang tahun 2019 tidak banyak aksi-aksi demonstrasi yang menandakan kondisi keamanan dan ketertiban maupun politik dan ekonomi di Batam cukup kondusif.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 telah memenuhi target kinerja Renja 2019 dan Renstra, meskipun ada kegiatan yang tidak memenuhi target. Oleh karena itu diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Batam melalui TAPD dalam memberikan pagu anggaran yang cukup kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat memenuhi target kinerja Renja maupun Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 3 (tiga program) yaitu Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2019 :

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2019)	Tahun n-1 (2020)	Tahun n (2021)	Tahun n+1 (2022)	Tahun n-2 (2019)	Tahun n-1 (2020)	Tahun n (2021)	Tahun n+1 (2022)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Jumlah aksi demo yang diamankan			50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	30 kali	15 kali	25 kali	25 kali	Realisasi capaian 60% menunjukkan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2019)	Tahun n-1 (2020)	Tahun n (2021)	Tahun n+1 (2022)	Tahun n-2 (2019)	Tahun n-1 (2020)	Tahun n (2021)	Tahun n+1 (2022)	
												kondisi batam relatif kondusif sehingga aksi-aksi demo tidak terlalu banyak
4	Jumlah Linmas yang diberdayakan			344 orang	344 orang	344 orang	344 orang	0 orang	100 orang	100 orang	100 orang	Target capaian disesuaikan dengan kemampuan anggaran

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang ada, realisasi capaian kinerja pada 2 (dua) indikator telah tercapai, yaitu Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan Meningkat dan terpeliharanya sarana danprasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tingkat capaian 100%.

Namun ada 2 indikator kinerja yang realisasi capaiannya tidak memenuhi target Renstra yaitu indikator kinerja jumlah aksi demo yang diamankan dengan realisasi capaian hanya 50%, di mana dari target 50 aksi demo yang diamankan ternyata hanya ada 25 aksi demo yang terjadi sepanjang tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Batam secara umum kondusif sehingga aksi-aksi demo yang relatif sedikit. Sedangkan untuk indikator kinerja jumlah Linmas yang diberdayakan, dari target 344 orang tidak terealisasi sehingga tingkat realisasi capaian 0%. Hal ini terjadi karena adanya rasionalisasi akibat defisit anggaran Pemerintah Kota Batam, sehingga realisasi pemberdayaan Linmas tidak dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat mengidentifikasi beberapa permasalahan umum terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terkait tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Pemetaan Permasalahan Umum Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)	Penegakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum masih kurang	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum
			2. Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum
			2. Pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP masih kurang
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamananan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran masih kurang

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam adalah:

a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu 1) menghadirkan *Clean Government,* 2) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan;

b. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu 1) penanganan ruas jalan strategis nasional dan provinsi, jalan-jalan di kawasan pemukiman maupun ruas jalan non status yang mempunyai nilai strategis dan ekonomi, 2) penanganan perumahan kumuh, penyediaan rumah murah dan Rusun, serta Peningkatan sarana dan prasarana utilitas kawasan pemukiman, 3) penyediaan transportasi massal darat dan laut yang murah dan refresentatif guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah perkotaan dan hinterland, 4) penanggulangan banjir.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat yang Berdaya Saing, dengan fokus pada isu 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan, 2) meningkatkan kualitas pelayanan dan jangkauan Kesehatan masyarakat, 3) pengentasan dan pemberdayaan masyarakat miskin, 4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,

d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada isu 1) pemenuhan standar ruang terbuka hijau, 2) pengelolaan persampahan, 3) pengelolaan sumberdaya air, 4) pengelolaan limbah secara terpadu, 5) pengurangan efek rumah kaca, 6) penanggulangan potensi resiko kekeringan.

e. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, dengan fokus pada isu 1) kualitas dan daya saing tenaga kerja, 2) kualitas transportasi publik untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi, 3) akses permodalan, kualitas produk dan akses pemasaran produk UMKM.

f. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan fokus pada isu 1) pengembangan konsep Kota Pintar (Smart city), 2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, 3) meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.

g. Peningkatan kualitas produk kepariwisataan (jasa dan perdagangan sebagai unggulan Kota Batam), dengan fokus pada isu 1) ekowisata bahari, 2) pusat wisata kuliner, 3) wisata historis dan budaya, 4) investasi pariwisata, 5) promosi pariwisata.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

a. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan *(stakeholders)* terhadap kinerja *(performance)* dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompentensi aparatur). Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

b. Penertiban pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum terutama yang berada di daerah milik jalan guna mendukung pembangunan infastruktur khususnya jalan yang bernilai strategis dan ekonomi;

c. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yan masih harus terus ditingkatkan;

d. Peningkatan sistem keamanan lingkungan guna menghadapai gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kota Batam Tahun 2021, tema yang diambil adalah “Memacu terwujudnya Bandar Dunia Madani yang berdaya saing, maju, sejahtera dan bermartabat”, dengan 5 (lima) prioritas pembangunan yaitu:

a. Peningkatan infrastruktur Kota Batam;

b. Peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas dan bermartabat;

c. Reformasi Birokrasi;

d. Peningkatan Investasi dan pariwisata;

e. Pemerataan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas, Sasaran, dan Program RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4

Prioritas Pembangunan, Fokus, dan Program Ranwal RKPD Tahun 2021

Tema: Memacu terwujudnya Bandar Dunia Madani yang berdaya saing, maju, sejahtera dan bermartabat.

PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	PROGRAM
1. Peningkatan Infrastruktur Kota Batam	1.1. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta penanganan banjir	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar
		Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan
	1.2. Pembangunan dan peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana kota dan permukiman	Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di Hinterland
		Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan
		Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Dasar Permukiman dan Perumahan*
		Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland
		Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
	1.3. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi Kota Batam untuk menunjang pemerataan ekonomi masyarakat	Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal
		Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas
		Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi
	1.4. Pembangunan dan peningkatan penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Program Lingkungan Sehat
2. Peningkatan kapasitas SDM yang berkualitasdan	2.1. Peningkatan kualitas Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
		Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	PROGRAM
bermartabat		Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan*
		Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
	2.2. Peningkatan kualitas kesehatan	Program Pengembangan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
		Program Jaminan Kesehatan Daerah
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
		Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
	2.3. Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Reformasi Birokrasi	3.1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Program Peningkatan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang undangan
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	3.2. Peningkatan kapasitas ASN yang berbudi pekerti, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	Program Pengelolaan, Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur*
	3.3. Peningkatan kinerja APIP	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
	3.4. Penguatan Inovasi Daerah	Program perencanaan pembangunan daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN	FOKUS	PROGRAM
		Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Program Keamanan Data dan Informasi
		Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas
		Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan
4. Peningkatan Investasi dan Pariwisata	4.1. Melakukan Promosi Potensi Daerah sebagai tujuan investasi dengan menyederhanakan perizinan dan meningkatkan fungsionalitas MPP	Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
		Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
	4.2. Peningkatan Kualitas Pelestarian Kebudayaan dan Objek Pariwisata	Program Pengembangan Sektor Pariwisata
		Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya
5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	5.1. Peningkatan daya tahan masyarakat terhadap perubahan kondisi ekonomi	Program Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Pasar
		Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat
	5.2. Peningkatan kapasitas, kualitas dan diversifikasi produk hasil usaha perikanan, pertanian dan usaha lainnya.	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan Peternakan
		Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan
	5.3. Pengurangan tingkat keparahan kedalaman kemiskinan	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Dari Prioritas pembangunan, fokus, dan Program RKPD Tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam akan memiliki peran yang penting

pada prioritas pertama yaitu Peningkatan Infrastruktur Kota Batam. Dengan geliat pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Walikota Batam, maka dukungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk menertibkan dan menata lokasi-lokasi yang akan dijadikan objek pembangunan sangat penting, terutama bangunan atau kios-kios liar di sepanjang jalan utama yang dibangun. Demikian juga dengan pembangunan infastruktur lainnya. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah, Kegiatan Pengawasan dan Pendataan Pelanggaran Ketertiban Umum, maupun kegiatan lainnya.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Kota Batam**	**Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam**	**100%**	**26,371,578,900.00**	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kota Batam**	**Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam**	**100%**	**22,162,132,434.00**	
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran	1 Tahun	26,371,578,900.00	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran	1 Tahun	22,162,132,434.00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Kota Batam**	**Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah**	**60%**	**2,338,303,500.00**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Kota Batam**	**Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah**	**60%**	**2,873,480,516.00**	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	607,242,500.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	2,185,639,636.00	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	1,731,061,000.00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	687,840,880.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	**Kota Batam**	**Jumlah Aksi Demo yang diamankan**	**25 Kali**	**2,371,972,000.00**	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat**	**Kota Batam**	**Jumlah Aksi Demo yang diamankan**	**25 Kali**	**2,778,084,000.00**	
		Jumlah Linmas yang diberdayakan	**100 Orang**				**Jumlah Linmas yang diberdayakan**	**100 Orang**		
Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	Kota Batam	Terlaksananya penertiban rumah liar dan kios liar di Kota Batam	12 Kali	691,500,000.00	Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah	Kota Batam	Terlaksananya penertiban rumah liar dan kios liar di Kota Batam	12 Kali	775,500,000.00	
Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya pengamanan aksi demonstrasi dan objek vital Pemerintah Kota Batam	25 Kali	515,000,000.00	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya pengamanan aksi demonstrasi dan objek vital Pemerintah Kota Batam	25 Kali	632,500,000.00	
Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Perda/Perkada	12 Kali	222,000,000.00	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Perda/Perkada	12 Kali	342,950,000.00	
Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	Kota Batam	Terlaksananya pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	30 Hari	615,600,000.00	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan	Kota Batam	Terlaksananya pengawasan Tempat Hiburan Malam selama bulan suci Ramadhan	30 Hari	603,900,000.00	
Sosialisasi dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batam	12 Kali	126,600,000.00	Sosialisasi dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batam	12 Kali	100,800,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas	Kota Batam	Jumlah petugas Linmas yang mengikuti Pembinaan	100 Orang, 1 Kali	162,250,000.00	Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas	Kota Batam	Jumlah petugas Linmas yang mengikuti Pembinaan	100 Orang	189,917,000.00	
Pemantapan Kinerja Tenaga Fungsional dan PPNS Satpol PP	Kota Batam	Jumlah pegawai Satpol PP yang mengikuti pemantapan kinerja	50 Orang	39,022,000.00	Pemantapan Kinerja Tenaga Fungsional dan PPNS Satpol PP	Kota Batam	Jumlah Pejabat Fungsional dan PPNS yang mengikuti pemantapan kinerja	120 Orang	132,517,000.00	Target kinerja melebihi Ranwal RKPD karena akumulasi dari target tahun 2020, di mana kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan akibat rasionalisasi anggaran tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19

Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2021, program dan kegiatan yang direncanakan berjumlah 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 31.081.854.400 (tiga puluh satu milyar delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus rupiah), dan setelah dilakukan analisa kebutuhan serta perkembangan kondisi tahun 2020, maka ada perbedaan kebutuhan pagu indikatif pada setiap program dan kegiatan.

2.5 Penelaahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncananaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepadapemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Menurut pengamatan kami selama pelaksanaan Musrenbang tahun 2020 mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota, tidak ada usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga penelaaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tidak disajikan dan dibahas pada sub bab ini.

Tabel 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2021

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yangkokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Saat ini kita akan memasuki RPJMN ke-4 (2020-2024) yang merupakan periode ke-2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kini berpasangan dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin setelah kembali terpilih pada Pemilu tanggal 17 April 2019 dan telah dilantik pada 20 Oktober 2019.

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi yang ditetapkan adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata danBerkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yangBerkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang MencerminkanKepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang BebasKorupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada SeluruhWarga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalamKerangka Negara Kesatuan

Untuk mencapai visi dan misi, Pmerintah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu: pembangunan yang diusung adalah "Berpenghasilan Menengah -Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental danPembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
1. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
2. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah berdasarkan misi adalah:

a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan;
b. Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi hidup bermasyarakat;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah:

a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Rincian tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih dan transparan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	68.08	70	72	75	80
2	Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi hidup bermasyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Partisipasi Linmas dalam ketertiban umum	344 orang	344 orang	344 orang	344 orang	344 orang	344 orang

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran

   1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

   1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

   2) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

   1) Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah;

   2) Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam;

   3) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Terhadap Peraturan Daerha Korta Batam;

   4) Kegiatan Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan;

   5) Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam;

   6) Kegiatan Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas;

   7) Kegiatan Pemantapan Kinerja Tenaga Fungsional dan PPNS Satpol PP.

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021 adalah berikut:

Tabel 8

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021

dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01. 05.01.01.	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam**		**100%**	**22,162,132,434.00**			**25,486,452,299.00**
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi Perkantoran	Batam	1 Tahun	22,162,132,434.00	Prioritas	1 Tahun	**25,486,452,299.00**
1.01.1.01. 05.01.02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan pungsi Pemerintah**		**100%**	**2.873.480.516,00**			**3,304,502,593.40**
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Batam	1 Tahun	2,185,639,636.00	Prioritas	1 Tahun	2,513,485,581.40

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Batam	1 Tahun	687,840,880.00	Prioritas	1 Tahun	791,017,012.00
1.01.05.1.01.05.01.15.	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat**	**1. Jumlah aksi Demo yang diamankan; 2. Jumlah Linmas yang diberdayakan**		**1. 25 kali; 2. 100 orang**	**2,778,084,000.00**		**1. 25 kali; 2. 100 orang**	**3,194,796,600.00**
	Penertiban Ruli dan Kili di Lahan Milik Pemerintah	Terlaksananya penertiban rumah liar dan kios liar di Kota Batam	Batam	12 kali	775,500,000.00	Prioritas	12 kali	891,825,000.00
	Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam	Terlaksananya pengamanan aksi demonstrasi dan objek vital Pemerintah Kota Batam	Batam	25 kali	632,500,000.00	Prioritas	25 kali	727,375,000.00
	Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Terlaksananya Operasi Yustisi terhadap pelanggaran Perda/Perkada	Batam	12 kali	342,950,000.00	Prioritas	12 kali	394,392,500.00
	Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Ramadhan	Terlaksananya pengawasan tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan	Batam	30 hari	603,900,000.00	Prioritas	30 hari	694,485,000.00
	Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batam	Batam	12 kali	100,800,000.00	Prioritas	12 kali	115,920,000.00

Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcome)* dan Kegiatan *(output)*	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas	Jumlah petugas Linmas yang mengikuti pembinaan	Batam	100 orang	189,917,000.00	Prioritas	100 orang	218,404,550.00
	Pemantapan Kinerja Tenaga Fungsional dan PPNS Satpol PP	Jumlah tenaga fungsional dan PPNS Satpol PP yang mengikuti pemantapan kinerja	Batam	120 orang	132,517,000.00	Prioritas	120 orang	152,394,550.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

Rencana kerja dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
						APBD KOTA	APBD PROV	APBN
1	2			3	4	5	6	7
1	**Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**					**22,162,132,434.00**	0	0
	1.1.	**Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**22,162,132,434.00**	0	0
		-	Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap	Batam	5837	17,231,500,000.00	0	0
		-	Upah Buruh/Tenaga Kerja	Batam	52	153,400,000.00	0	0
		-	Honorarium Jasa Tenaga Ahli	Batam	6	13,500,000.00	0	0
		-	Honorarium Jasa Instruktur	Batam	33	9,900,000.00	0	0
		-	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis	Batam	1	58,440,434.00	0	0
		-	Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis	Batam	1	7,451,000.00	0	0
		-	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Batam	950	5,400,000.00	0	0
		-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Batam	1	41,860,000.00	0	0
		-	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Batam	61464	646,644,000.00	0	0
		-	Belanja Rekening Air	Batam	12	29,400,000.00	0	0
		-	Belanja Rekening Listrik	Batam	12	211,200,000.00	0	0
		-	Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Batam	12	7,200,000.00	0	0
		-	Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili	Batam	12	48,000,000.00	0	0
		-	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Batam	5436	951,300,000.00	0	0
		-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	1	24,572,000.00	0	0
		-	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen	Batam	85000	25,500,000.00	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
						APBD KOTA	APBD PROV	APBN
1	2			3	4	5	6	7
		-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor	Batam	1	19,000,000.00	0	0
		-	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	1	446,775,000.00	0	0
		-	Belanja Atribut Pakaian Dinas	Batam	664	582,580,000.00	0	0
		-	Belanja Pakaian Kerja Polisi Pamong Praja dan Atributnya	Batam	664	834,596,000.00	0	0
		-	Belanja Pakaian Olahraga	Batam	664	440,200,000.00	0	0
		-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Batam	1	338,514,000.00	0	0
		-	Belanja Pajak Daerah	Batam	22	32,200,000.00	0	0
		-	Belanja Retribusi Daerah	Batam	12	3,000,000.00	0	0
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**					**2,873,480,516.00**	0	0
	2.1.	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**2,185,639,636.00**	0	0
		-	Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Batam	2	810,398,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Alta-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	Batam	2	692,370,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Scan Jari	Batam	4	20,000,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Almari	Batam	5	62,500,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Whiteboard/Papan Pengumuman	Batam	2	5,500,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	Batam	10	57,600,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Batam	10	67,250,000.00	0	0
		-	Bealanja Modal Pengadaan Printer	Batam	5	43,750,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Scanner	Batam	0	0	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	Batam	6	41,100,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	Batam	1	17,675,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	Batam	64	80,410,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Partisi	Batam	110	66,000,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Camera	Batam	12	54,000,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Handycam	Batam	1	13,850,000.00	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
						APBD KOTA	APBD PROV	APBN
1	2			3	4	5	6	7
		-	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	Batam	1	12,616,636.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Speaker	Batam	1	5,950,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	Batam	3	8,625,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Mic Tiang	Batam	0	0	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie	Batam	10	33,000,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer	Batam	7	49,425,000.00	0	0
		-	Belanja Modal Pengadaan Teralis	Batam	60	43,620,000.00	0	
	2.2.	**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**687,840,880.00**	0	0
		-	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Batam	10	3,100,000.00	0	0
		-	Belanja Jasa Servis Kendaraan Bermotor	Batam	1	98,120,000.00	0	0
		-	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Batam	1	391,480,000.00	0	0
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Batam	1	22,860,000.00	0	0
		-	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Batam	1	0	0	0
		-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja/Kantor	Batam	1	172,280,880.00	0	0
3	**Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat**					**2,778,084,000.00**	0	0
	3.1.	**Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar Di Lahan Milik Pemerintah**				**775,500,000.00**	0	0
		-	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	1992	546,000,000.00	0	0
		-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran, Iklan	Batam	12	42,000,000.00	0	0
		-	Belanja Sewa Eskavator	Batam	84	36,900,000.00	0	0
		-	Belanja Konsumsi/Acara Kegiatan	Batam	8640	150,600,000.00	0	0
	3.2.	**Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam**				**342,950,000.00**	0	0
		-	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	120	96,000,000.00	0	0
		-	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	216	72,000,000.00	0	0
		-	Balanja Barang Pakai Habis Keamanan dan	Batam	10	1,250,000.00	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
						APBD KOTA	APBD PROV	APBN
1	2			3	4	5	6	7
			Ketertiban					
		-	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan	Batam	36	126,000,000.00	0	0
		-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Batam	2760	47,700,000.00	0	0
	3.3.	**Sosialisasi dan Penyuluhan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam**				**100,800,000.00**	0	0
		-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	1200	82,800,000.00	0	0
		-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Batam	1200	18,000,000.00	0	0
	3.4.	**Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan**				**603,900,000.00**	0	0
		-	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	1440	450,000,000.00	0	0
		-	Belanja Konsumsi Acara / Kegiatan	Batam	8280	153,900,000.00	0	0
	3.5.	**Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam**				**632,500,000.00**	0	0
		-	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Batam	375	187,500,000.00	0	0
		-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Batam	13500	445,000,000.00	0	0
	3.6.	**Pembinaan Linmas dan Peringatan HUT Linmas**				**189,917,000.00**	0	0
		-	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	6	10,100,000.00	0	0
		-	Uang Saku Peserta	Batam	300	0	0	0
		-	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis	Batam	100	4,775,000.00	0	0
		-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	100	5,430,000.00	0	0
		-	Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan	Batam	100	32,250,000.00	0	0
		-	Belanja Pakaian Olahraga	Batam	100	0	0	0
		-	Belanja Pakaian Hansip dan Atributnya	Batam	100	111,800,000.00	0	0
		-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Batam	2	3,188,000.00	0	0
		-	Belanja Transportasi Darat	Batam	160	20,300,000.00	0	0
		-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang	Batam	2	2,074,000.00	0	0
	3.7.	**Pemantapan Kinerja Tenaga Fungsional dan PPNS Satpol PP**				**132,517,000.00**	0	0
		-	Honorarium Jasa Narasumber	Batam	8	43,200,000.00	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN			LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
						APBD KOTA	APBD PROV	APBN
1	2			3	4	5	6	7
		-	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis	Batam	120	4,321,000.00	0	0
		-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	120	18,000,000.00	0	0
		-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Batam	140	27,300,000.00	0	0
		-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Batam	8	39,696,000.00	0	0
	TOTAL					**27,813,696,950.00**	**0.00**	**0.00**

BAB V

PENUTUP

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2021 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2021 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehinggaapabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Renja Tahun 2021 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakatsesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Renja Tahun 2021 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021.